

Ekonomi Politik Mekanisme Distribusi Manfaat dari PSDH-DR untuk Mitigasi Deforestasi dan Degradasi Hutan

(Studi Kasus: Kabupaten Musi Banyuasin, Kutai Kartanegara, Bulungan, dan Berau)

Temuan Utama

- Aktor-aktor di luar birokrasi (*demand side*) beranggapan bahwa alokasi dana untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) selama ini belum optimal dan tepat sasaran.
- Hasil analisis policy outcome menunjukkan bahwa aktor di dalam birokrasi (*supply side*), yaitu Bupati menjadi aktor kunci yang dapat menentukan Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat (UKDM) ini dimenangkan atau tidak.
- Aktor-aktor di luar birokrasi (*demand side*) sebagai pemangku kepentingan yang menjadi weak supporters terkait UKDM akan berpengaruh signifikan jika melakukan koalisi atau membentuk aliansi, dengan menempatkan organisasi/personal yang paling tinggi pengaruhnya di antara mereka sebagai aktor utama.

1. Latar Belakang

Pada saat ini, alokasi dan distribusi dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) tampaknya belum cukup mampu memberikan insentif yang tepat bagi para pelaku di sektor kehutanan untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Hasil riset Forest Watch Indonesia (Sumargo, *et al.*, 2011) menunjukkan bahwa laju deforestasi di Indonesia masih sangat tinggi, yaitu mencapai 1,5 juta ha/tahun dari tahun 2000-2010.

Melihat realita kebijakan pengelolaan DBH Kehutanan saat ini, celah yang mungkin untuk melakukan intervensi kebijakan adalah melalui pengelolaan PSDH dan DR yang sepadan dengan tujuan-tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan di tingkat lokal. Usulan kebijakan yang dimaksud dalam kajian ini adalah sebuah skema BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi hutan berbasis penerimaan kehutanan dan/atau penerimaan pertambangan. Ini merupakan sebuah skema kebijakan yang menggabungkan pendekatan kelembagaan dan partisipasi publik. Skema tersebut dirancang di depan (*pre-conceived*) dengan merujuk pada kondisi dan syarat-syarat kelembagaan keuangan publik di Indonesia dan secara bersamaan memberikan ruang bagi partisipasi publik.

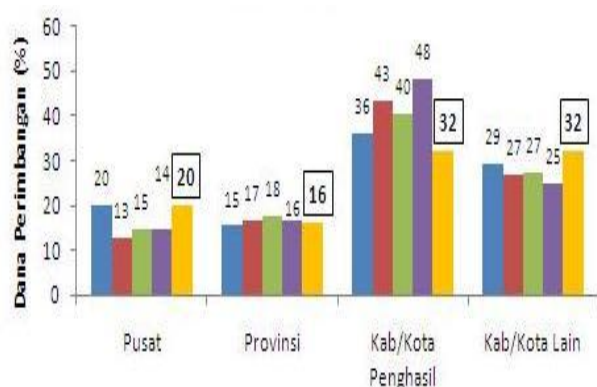
Political economy analysis di level daerah diperlukan untuk menemukan rumusan yang tepat tentang bagaimana ide BSM PSDH-DR ini diterima dan diterapkan di kabupaten/kota. Meminjam kategorisasi Von Lueke (2009), penelitian ini akan membedakan posisi, kepentingan, dan peran aktor-aktor ke dalam *demand-side* (dari luar birokrasi, termasuk Organisasi Masyarakat Sipil/OMS, Kelompok

Masyarakat Adat/KMA, dan Partai Politik/PARPOL) dan *supply-side* (dari dalam birokrasi, terutama Pemerintah daerah/PEMDA). Kategorisasi aktor ini digunakan untuk melihat kelompok aktor mana yang lebih menjelaskan kemungkinan *policy outcome*, yakni dimenangkan dan dijalankannya proposal BSM untuk mitigasi deforestasi dan degradasi yang diusulkan.

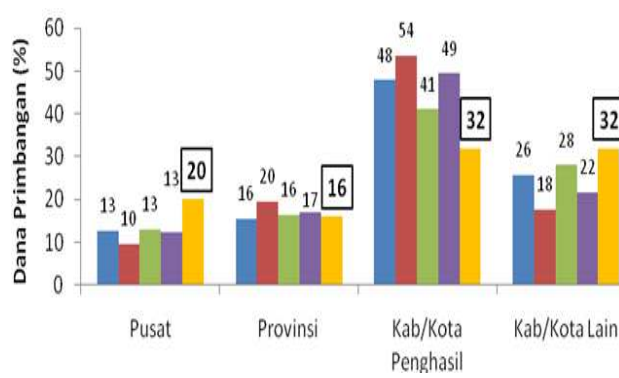
2. Pengelolaan PSDH-DR Saat Ini

Alokasi Ideal Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

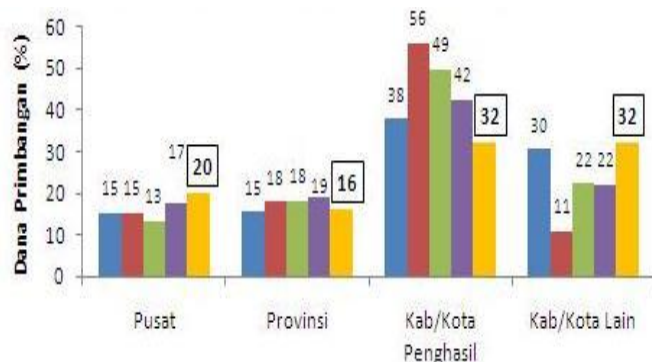
MUSI BANYUASIN



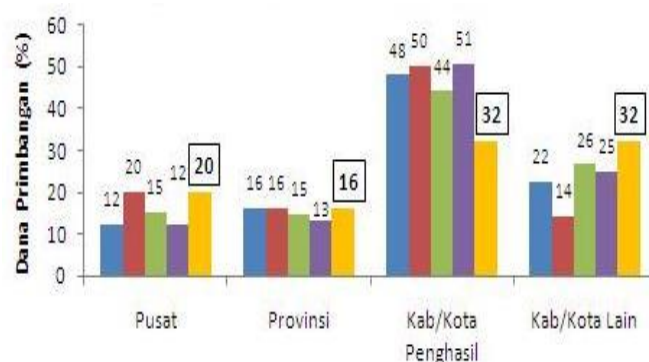
KUTAI KERTANEGARA



BULUNGAN



BERAU



Gambar 2.1. Grafik rata-rata persepsi ideal proporsi alokasi DBH PSDH di 4 Kabupaten

Alokasi DBH PSDH-DR dilakukan berdasarkan presentase atas realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing daerah. Proses perhitungan alokasi DBH SDA kehutanan dilaksanakan berdasarkan presentase yang diatur dalam PP Nomor 55 Tahun 2005 yang isinya:

A. PSDH

- Pusat 20%
- Provinsi 16%
- Kabupaten/Kota Penghasil 32%

d. Kabupaten/Kota lain dalam provinsi yang sama 32%

B. DR

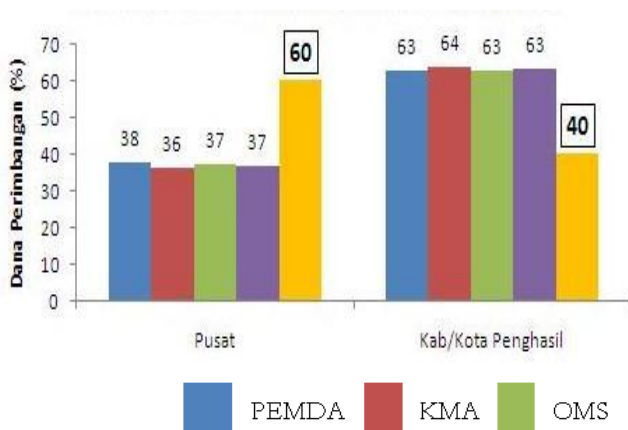
a. Pusat 60%

b. Kabupaten/Kota penghasil 40%

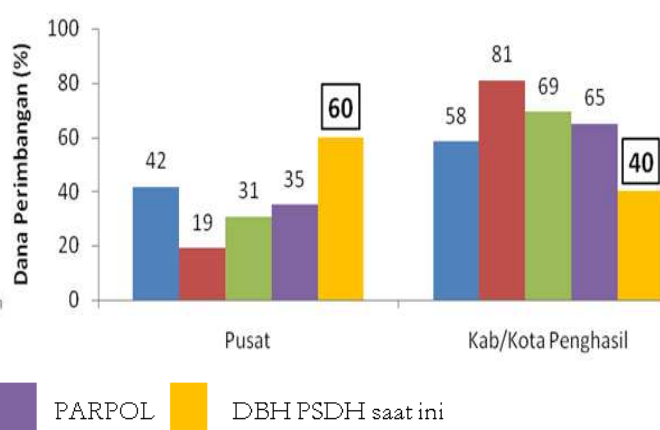
Semua kelompok aktor beranggapan bahwa skema alokasi DBH PSDH-DR Kehutanan saat ini belum cukup adil untuk daerah penghasil. Aktor-aktor dari PEMDA, OMS, KMA dan PARPOL berharap proporsi alokasi PSDH-DR lebih besar lagi dari proporsi yang berlaku saat ini. Bila tidak, skema alokasi DBH PSDH kehutanan saat ini tidak akan memberi insentif yang tepat bagi daerah untuk melakukan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan.

Alokasi Ideal Dana Reboisasi (DR)

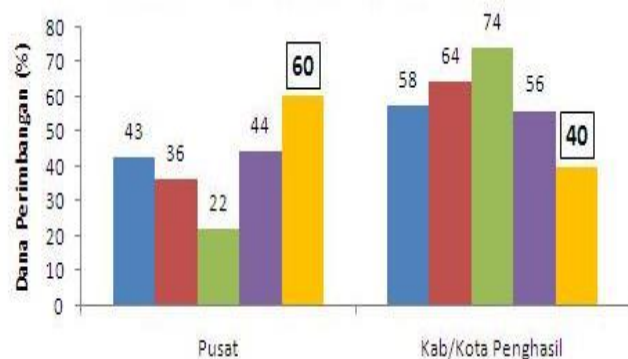
MUSI BANYUASIN



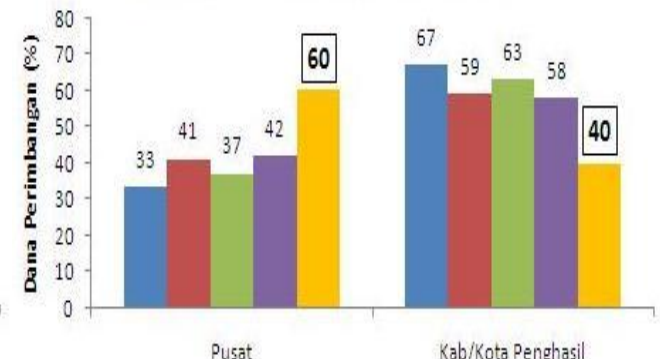
KUTAI KARTANEGARA



BULUNGAN



BERAU

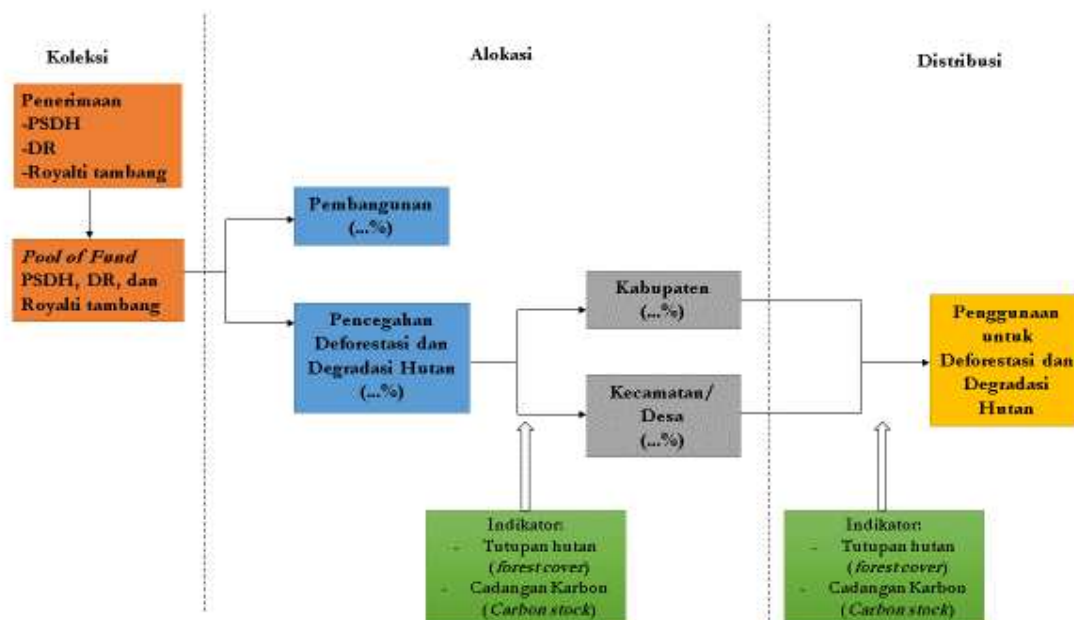


Gambar 2.2. Grafik rata-rata persepsi ideal proporsi alokasi DBH DR di 4 Kabupaten

3. Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat: *Dual-track fiscal decentralization Condet*

Kebijakan mekanisme distribusi manfaat yang diusulkan dapat dirancang melalui apa yang disebut Sonny Mumbunan (peneliti di Article 33 Indonesia) sebagai desentralisasi fiskal dua trek atau *dual-*

track fiscal decentralization. Melalui konsep ini, desentralisasi fiskal yang ada sekarang, hendak didorong lebih jauh dengan jalan meningkatkan peran pemerintah kabupaten dan melibatkan satuan administratif yang lebih rendah, dalam hal ini kecamatan/desa (lihat Gambar 2.1). Secara lebih khusus lagi, dalam upaya mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan akan dicapai dengan jalan mengusulkan sebuah kebijakan fiskal yang berlaku di tingkat kabupaten yang kaya sumber daya hutan dan tambang.



Gambar 3.1. *Dual-Track Fiscal Decentralization Concept* untuk Merancang UKDM

Secara praktis, berdasarkan Gambar 2.1 di atas, DBH yang berasal dari PSDH dan DR dan/atau Royalti Pertambangan (optional) yang diterima pemerintah kabupaten akan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan pembangunan yang terkait langsung dengan upaya mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Satu bagian (satu proporsi) dana DBH PSDH, DR dan/atau Royalti Pertambangan tersebut akan digunakan untuk tujuan tersebut. Dana tersebut akan disalurkan ke tingkat kecamatan/desa berdasarkan karakter kecamatan/desa tersebut, misalnya menggunakan indikator luas tutupan hutan (*forest cover*) atau kandungan karbon (*carbon stock*) dari kecamatan bersangkutan. Penggunaan dana yang sampai ke tingkat kecamatan/desa hendaknya dapat pula digunakan oleh perangkat kecamatan/desa untuk tujuan mitigasi deforestasi dan degradasi hutan dengan indikator keberhasilan yang sama dengan alokasi dana, yaitu tutupan hutan dan cadangan karbon. Adapun besaran dana (yakni, proporsi) dan tata cara alokasi (yakni, kriteria) tersebut akan ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam sebuah regulasi, katakanlah dalam sebuah Peraturan Daerah (Perda), yang dirumuskan bersama oleh PEMDA dengan KMS.

4. Ekonomi Politik Kebijakan Distribusi Manfaat

POLICY OUTCOME

Kapasitas diri untuk perubahan kebijakan

Tabel 4.1. Nilai rata-rata persepsi aktor mengenai kapasitas diri mereka masing-masing berdasarkan kelompok

MUSI BANYUASIN

	Pemerintah Daerah (Pemda) n=8	Partai Politik (Parpol) n=12	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) n=16	Kelompok Masyarakat Adat (KMA) n=10
Efektivitas Kebijakan	55,00	82,50	68,13	72,50
Memenangkan UKDM	53,75	80,00	73,13	81,25
Menjalankan Kebijakan	51,88	82,50	77,50	75,00
Distribusi Manfaat (KDM)				

KUTAI KARTANEGARA

	Pemerintah Daerah (PEMDA) n=8	Partai Politik (PARPOL) n=12	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) n=16	Kelompok Masyarakat Adat (KMA) n=10
Efektivitas Kebijakan	63,57	41,88	54,17	74,38
Memenangkan UKDM	55,00	30,63	52,29	67,50
Menjalankan Kebijakan	65,00	36,25	74,85	74,38
Distribusi Manfaat (KDM)				

■ Sangat tidak yakin
 ■ Tidak Yakin
 ■ Yakin
 ■ Sangat Yakin

BERAU

	Pemerintah Daerah (PEMDA) n=10	Partai Politik (PARPOL) n=11	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) n=10	Kelompok Masyarakat Adat (KMA) n=20
Efektivitas Kebijakan	70,45	77,50	73	71,50
Memenangkan UKDM	60,91	53	73,5	62,50
Menjalankan Kebijakan	69,09	79	76	65,50
Distribusi Manfaat (KDM)				

BULUNGAN

	Pemerintah Daerah (PEMDA) n=10	Partai Politik (PARPOL) n=11	Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) n=10	Kelompok Masyarakat Adat (KMA) n=20
Efektivitas Kebijakan	60,00	60,00	82,00	66,86
Memenangkan UKDM	57,86	65,00	75,50	60,56
Menjalankan Kebijakan	68,57	61,50	80,00	68,19
Distribusi Manfaat (KDM)				

Kelompok aktor di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki nilai persepsi rata-rata paling tinggi menyangkut penilaian mereka akan kapasitas diri mereka masing-masing. Persepsi tertinggi (sangat yakin) dimiliki oleh Kelompok PARPOL akan kemampuan mereka untuk memenangkan, menjalankan Kebijakan Distribusi Manfaat berikut dengan efektivitas dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, Kelompok PARPOL di Kabupaten Kutai Kartanegara justru menghasilkan nilai rata-rata persepsi yang paling rendah diantara 4 kabupaten yang ada (tidak yakin), sekaligus menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten dengan nilai rata-rata persepsi terendah.

Kapasitas pihak lain untuk melakukan perubahan kebijakan

Tabel 4.2. Nilai rata-rata persepsi aktor mengenai kapasitas pihak lain berdasarkan kelompok

MUSI BANYUASIN

	PEMDA n=8	PARPOL n= 8	OMS n=10	KMA n=10
Mengegalkan UKDM				
Bupati	61,88	82,50	64,50	78,50
KMS	46,88	77,50	63,00	72,00
PARPOL	63,13	80,63	68,00	67,00
Menyusun UKDM				
KMS	58,75	75,00	66,11	69,00
Menjalankan KDM				
Bupati	65,63	80,63	57,50	69,00
KMS	55,63	78,75	63,00	68,00
PARPOL	53,75	81,25	60,50	64,00
Mengawasi KDM				
KMS	59,38	77,75	62,50	69,50

KUTAI KARTANEGARA

	PEMDA n=8	PARPOL n=12	OMS n=16	KMA n=10
Mengegalkan UKDM				
Bupati	65,00	42,50	61,25	48,13
KMS	62,14	23,75	46,67	85,00
PARPOL	69,28	46,62	44,58	52,50
Menyusun UKDM				
KMS	70,00	23,13	53,18	56,25
Menjalankan KDM				
Bupati	72,85	24,38	52,50	55,62
KMS	72,14	31,88	53,33	81,88
PARPOL	68,57	42,50	42,91	51,88
Mengawasi KDM				
KMS	70,71	38,75	67,50	81,88

■ Sangat tidak yakin
 ■ Tidak Yakin
 ■ Yakin
 ■ Sangat Yakin

BERAU

	PEMDA n=10	PARPOL n= 11	OMS n=10	KMA n=20
Mengegalkan UKDM				
Bupati	70,91	53,00	68,00	63,00
KMS	62,27	72,50	70,00	68,00
PARPOL	68,18	74,00	51,50	51,00
Menyusun UKDM				
KMS	55,45	68,50	68,50	67,50
Menjalankan KDM				
Bupati	73,64	55,00	68,00	64,00
KMS	66,82	70,5	69,00	65,50
PARPOL	66,36	76,00	66,50	38,00
Mengawasi KDM				
KMS	73,64	72,5	51,50	78,50

BULUNGAN

	PEMDA n=10	PARPOL n= 11	OMS n=10	KMA n=20
Mengegalkan UKDM				
Bupati	62,86	54,00	71,00	54,00
KMS	62,14	58,00	71,00	63,00
PARPOL	62,86	60,50	53,00	55,00
Menyusun UKDM				
KMS	62,86	57,00	52,50	50,50
Menjalankan KDM				
Bupati	67,14	56,00	72,00	58,00
KMS	65,71	62,5	65,50	51,00
PARPOL	57,14	59,00	51,50	62,00
Mengawasi KDM				
KMS	67,86	59,5	70,00	56,50

Dari keempat kabupaten tersebut, Kelompok aktor di Kabupaten Bulungan adalah kelompok aktor yang memiliki persepsi cenderung sama antara satu dengan yang lain (dalam kategori yakin). Namun Kelompok aktor di Kabupaten Musi Banyuasi (terutama kelompok parpol) adalah kelompok aktor yang memiliki tingkat keyakinan paling tinggi (sangat yakin) bahwa aktor-aktor dalam kelompok parpol dapat melakukan perubahan kebijakan terkait KDM. Kutai Kartanegara, seperti sub bab sebelumnya, memiliki tingkat persepsi keyakinan paling rendah diantara tiga kabupaten lainnya (tidak yakin-sangat tidak yakin). Hal ini lagi-lagi menjadikan kabupaen ini sebagai kabupaten dengan nilai rata-rata persepsi yang rendah menyangkut kapasitas aktor lain untuk melakukan perubahan kebijakan.

Kapasitas aktor untuk mempengaruhi pihak lain

Tabel 4.3. Nilai rata-rata persepsi aktor mengenai kemampuan mempengaruhi pihak lain berdasarkan kelompok

MUSI BANYUASIN

	PEMDA n=8	PARPOL n=8	OMS n= 10	KMA n= 10
Memenangkan UKDM				
Bupati	59,37	81,25	65,00	70,00
KMS	58,12	80,00	70,00	78,75
PARPOL	51,87	81,25	71,25	70,62
Menjalankan KDM				
Bupati	61,25	80,62	65,00	75,62
KMS	60,00	77,5	70,00	79,37
Mengawasi KDM				
PARPOL	53,75	81,25	69,37	77,50

KUTAI KARTANEGARA

	PEMDA n=8	PARPOL n=12	OMS n=16	KMA n=10
Memenangkan UKDM				
Bupati	54,17	30,00	52,70	70,62
KMS	59,16	26,87	67,29	80,62
PARPOL	70,83	36,25	43,54	73,12
Menjalankan KDM				
Bupati	50,83	26,25	54,16	70,62
KMS	68,33	32,50	67,29	80,87
Mengawasi KDM				
PARPOL	65,83	33,12	39,37	60,00

 Sangat tidak yakin
  Tidak Yakin
  Yakin
  Sangat Yakin

BERAU

	PEMDA n=11	PARPOL n= 10	OMS n= 10	KMA n= 10
Memenangkan UKDM				
Bupati	57,27	71,50	67,00	65,00
KMS	60,91	72,50	70,50	66,25
PARPOL	60,91	80,00	57,00	47,50
Menjalankan KDM				
Bupati	60,45	71,50	65,50	65,63
KMS	62,27	72,50	67,50	69,83
Mengawasi KDM				
PARPOL	64,55	76,00	56,50	62,50

BULUNGAN

	PEMDA n=10	PARPOL n= 11	OMS n= 10	KMA n=20
Memenangkan UKDM				
Bupati	60,71	59,00	66,50	57,42
KMS	56,43	58,50	69,50	70,03
PARPOL	56,43	61,00	61,00	55,39
Menjalankan KDM				
Bupati	61,43	59,00	66,00	57,97
KMS	57,86	62,50	72,50	67,61
Mengawasi KDM				
PARPOL	54,29	60,50	52,00	50,86

Dari keempat kabupaten tersebut, kelompok-kelompok aktor di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tingkat persepsi keyakinan yang paling tinggi (yakin dan sangat yakin) dapat mempengaruhi kelompok aktor lainnya terkait Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat yang ditawarkan. Sementara di sisi lain, pada Kabupaten Kutai Kartanegara, memiliki rata-rata tingkat persepsi keyakinan paling rendah (tidak yakin, yakin, sangat yakin) terkait kemampuan mereka untuk mempengaruhi kelompok

aktor lainnya untuk mau memenangkan, menjalankan, dan mengawasi Kebijakan Distribusi Manfaat ini.

Kapasitas pihak lain untuk mempengaruhi aktor

Tabel 4.4. Nilai rata-rata persepsi aktor mengenai kemampuan pihak lain untuk mempengaruhi mereka berdasarkan kelompok

MUSI BANYUASIN

	PEMDA n=8	PARPOL n=8	OMS n=10	KMA n=10
Memenangkan UKDM				
Bupati	68,12	81,25	66,25	73,12
KMS	53,75	80,62	68,12	73,75
PARPOL	54,37	83,12	60,00	69,37
Menjalankan KDM atau Mengawasi KDM				
Bupati	78,64	66,00	81,00	65,00
KMS	65,91	76,00	80,00	68,50
PARPOL	64,55	78,50	77,50	60,50

KUTAI KARTANEGARA

	PEMDA n=8	PARPOL n=12	OMS n=16	KMA n=10
Memenangkan UKDM				
Bupati	62,50	25,00	42,70	61,87
KMS	50,83	33,75	54,79	68,75
PARPOL	60,00	37,50	42,29	58,75
Menjalankan KDM atau Mengawasi KDM				
Bupati	70,00	32,50	44,79	63,12
KMS	54,16	37,50	58,12	75,62
PARPOL	61,66	43,12	43,40	63,75

■ Sangat tidak yakin
 ■ Tidak Yakin
 ■ Yakin
 ■ Sangat Yakin

BERAU

	PEMDA n=11	PARPOL n=10	OMS n=10	KMA n=10
Memenangkan UKDM				
Bupati	78,64	68,00	84,00	65,00
KMS	59,55	75,00	80,50	66,00
PARPOL	64,55	78,00	76,00	46,00
Menjalankan KDM atau Mengawasi KDM				
Bupati	78,64	66,00	81,00	65,00
KMS	65,91	76,00	80,00	68,50
PARPOL	64,55	78,50	77,50	60,50

BULUNGAN

	PEMDA n=10	PARPOL n= 11	OMS n= 10	KMA n=20
Memenangkan UKDM				
Bupati	58,57	55,50	72,00	64,72
KMS	59,29	55,50	74,00	58,97
PARPOL	55,00	59,50	69,00	54,75
Menjalankan KDM atau Mengawasi KDM				
Bupati	59,29	51,00	71,50	68,36
KMS	58,57	49,50	75,50	59,64
PARPOL	55,00	57,50	63,75	57,92

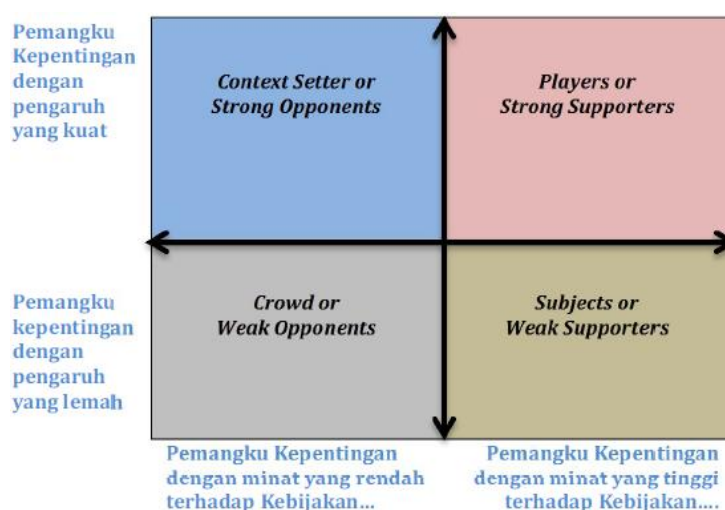
Kelompok aktor di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tingkat persepsi keyakinan rata-rata yang paling tinggi dibandingkan daerah lainnya (yakin dan sangat yakin), bahwa mereka dapat dipengaruhi

oleh kelompok aktor lainnya untuk memenangkan, menjalankan dan mengawasi Kebijakan Distribusi Manfaat lainnya. Di sisi lain, para kelompok aktor di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat persepsi rata-rata yang paling rendah (sangat tidak yakin hingga sangat yakin) bahwa mereka dapat dipengaruhi oleh kelompok aktor lainnya terkait Kebijakan Distribusi Manfaat.

KONSTALASI AKTOR

Pada bagian ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai konstelasi aktor manakala para pemangku kepentingan ditawarkan sebuah skema hipotetis terkait distribusi manfaat dari kegiatan atau upaya mitigasi deforestasi dan degradasi hutan. Pada bagian ini akan dibagi menjadi dua sub bab yaitu:

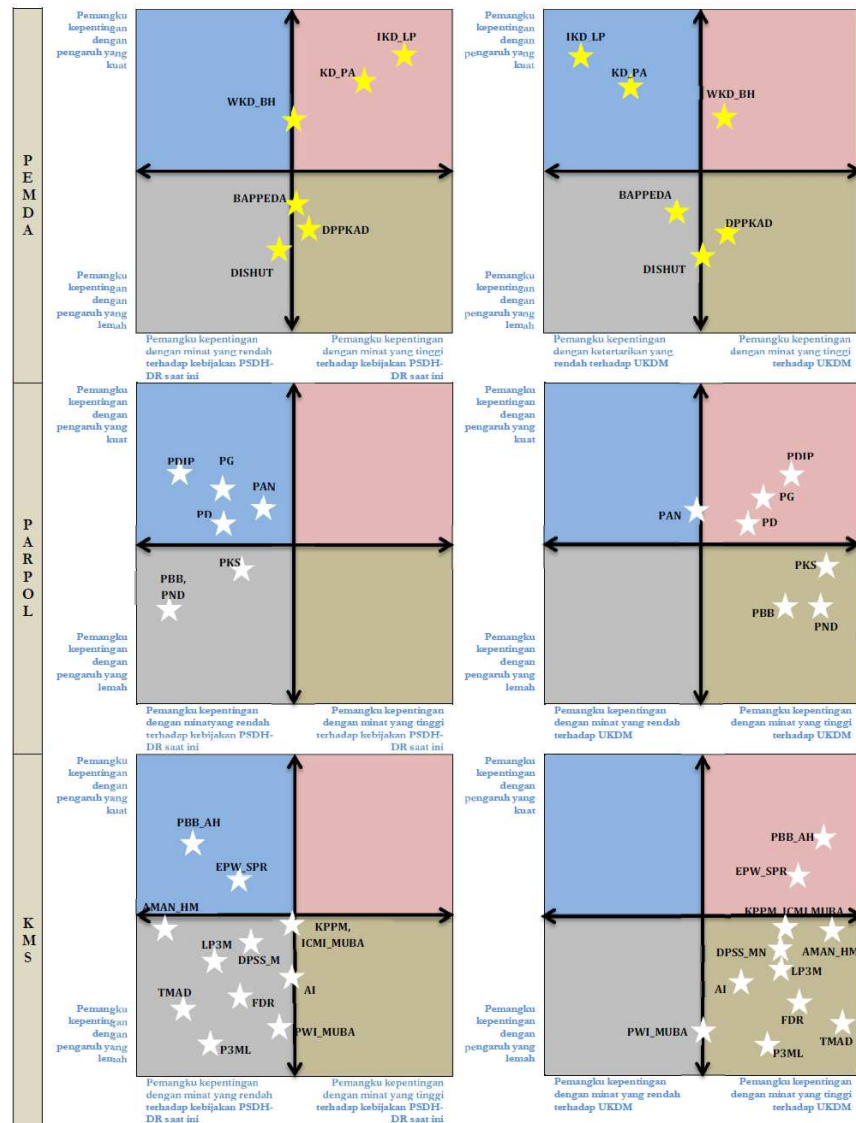
1. Pergeseran posisi aktor-aktor berdasarkan kelompok aktor
2. Pemetaan dan hubungan antar-pemangku kepentingan menyangkut UKDM



Pergeseran posisi aktor-aktor berdasarkan kelompok terkait kebijakan PSDH-DR saat ini dan Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat

Secara umum seluruh aktor *demand side* di keempat Kabupaten sama memiliki minat yang rendah terhadap kebijakan PSDH-DR saat ini, namun berlaku sebaliknya ketika mereka ditawarkan Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat. Di sisi lain, aktor-aktor *supply side* di keempat Kabupaten memiliki minat yang berbeda-beda terkait kebijakan PSDH-DR saat ini dan juga Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat.

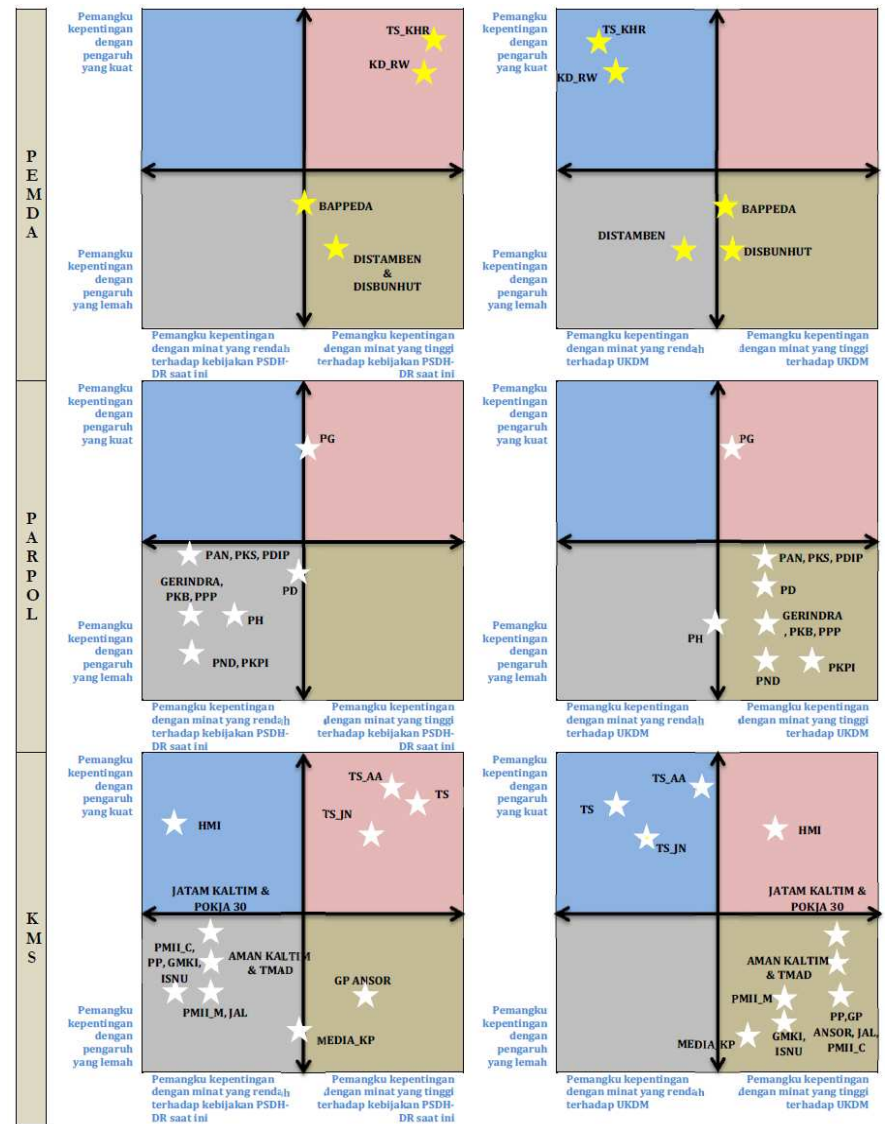
MUSI BANYUASIN



Gambar 1(a). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait kebijakan PSDH-DR saat ini

Gambar 1(b). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait UKDM

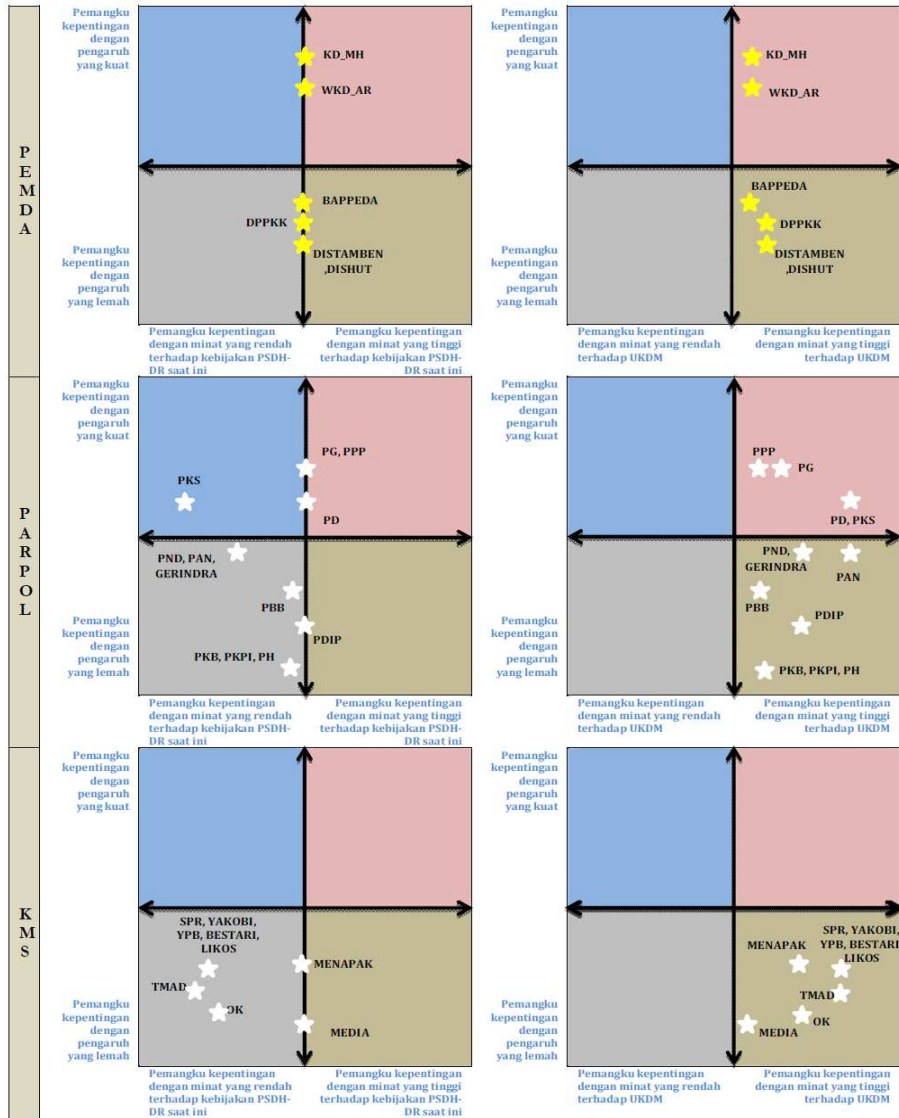
KUTAI KARTANEGARA



Gambar 1(a). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait kebijakan PSDH-DR saat ini

Gambar 1(b). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait UKDM

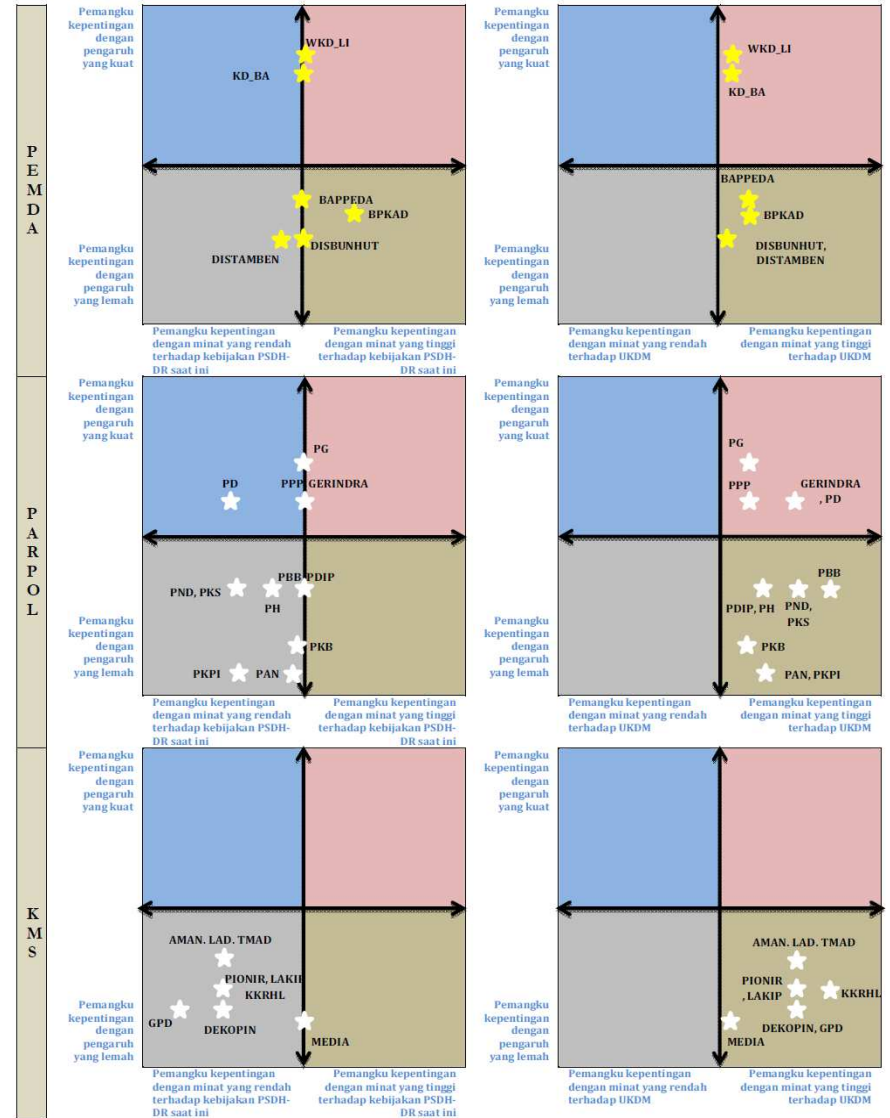
BERAU



Gambar 1(a). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait kebijakan PSDH-DR saat ini

Gambar 1(b). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait UKDM

BULUNGAN



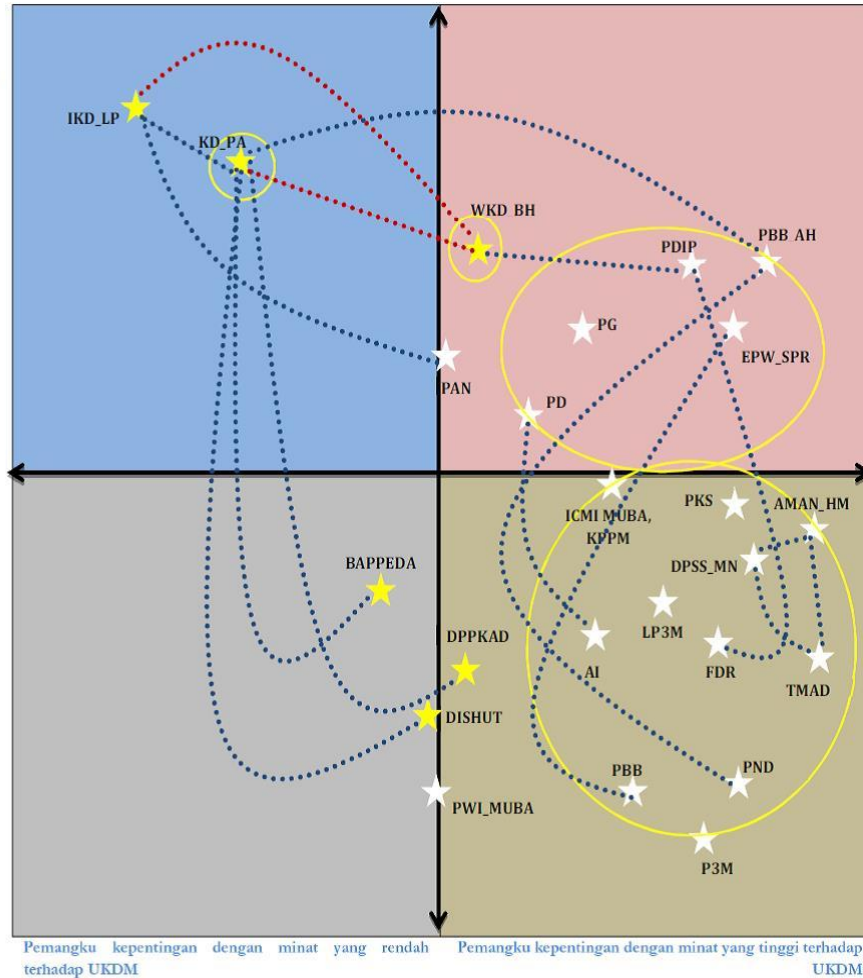
Gambar 1(a). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait kebijakan PSDH-DR saat ini

Gambar 1(b). Interest-Influence Grids pemangku kepentingan terkait UKDM

Pemetaan dan hubungan antar-pemangku kepentingan menyangkut UKDM

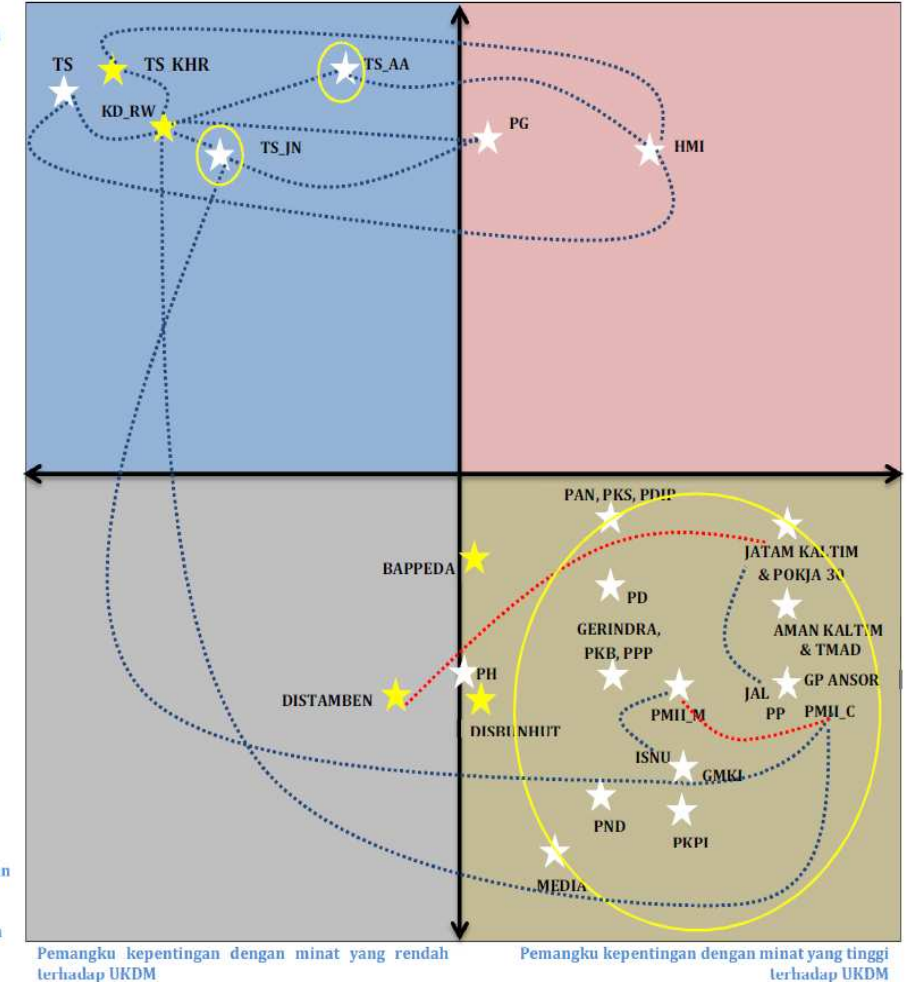
MUSI BANYUASIN

Pemangku kepentingan dengan pengaruh yang kuat



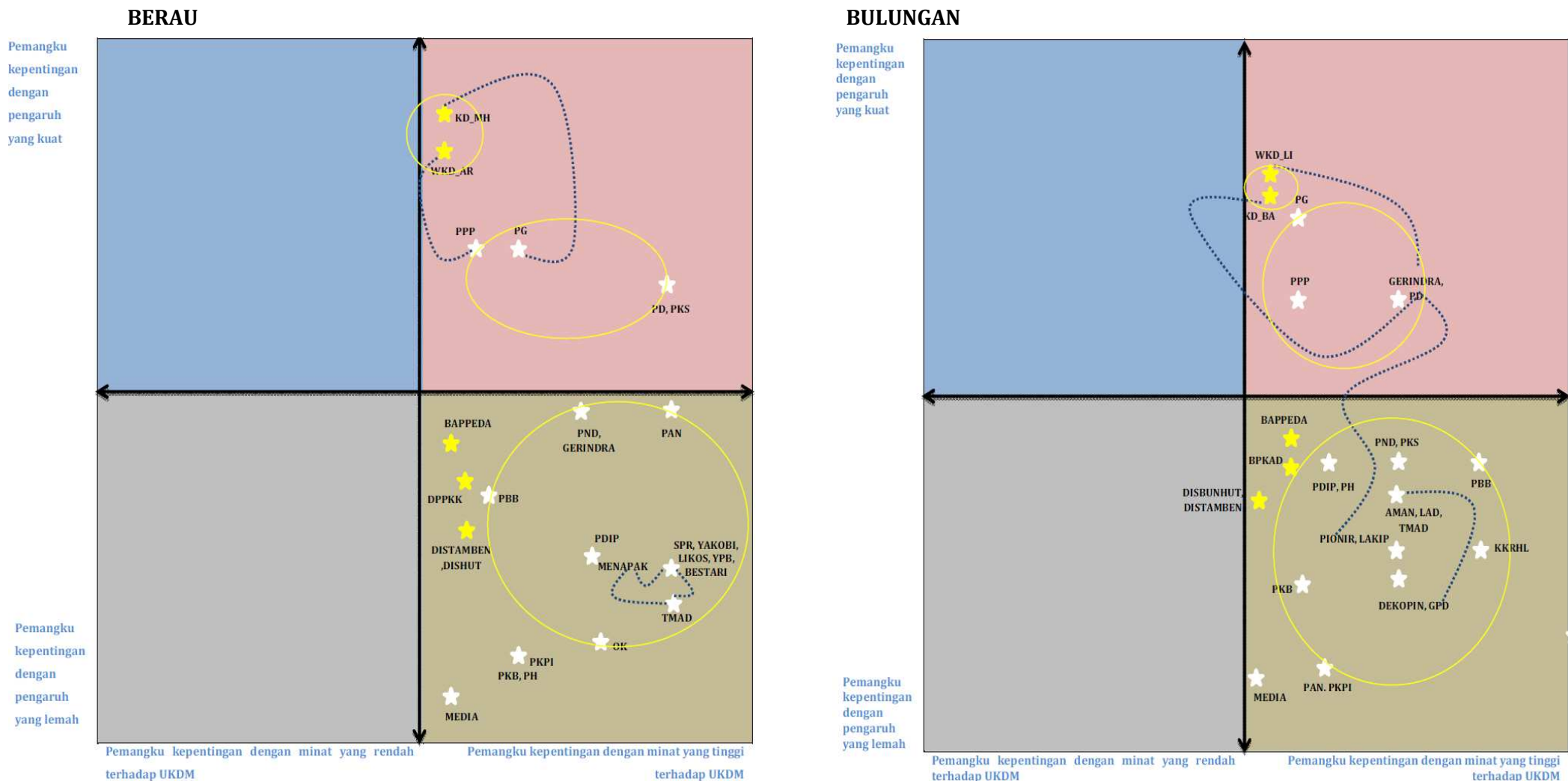
KUTAI KARTANEGARA

Pemangku kepentingan dengan pengaruh yang kuat



Gambar 4.5. Interest-Influence Grid dan hubungan antar-pemangku kepentingan terkait UKDM

Keterangan:			
★	Aktor Supply Side	☆	Aktor Demand Side
.....	Hubungan yang baik		
.....	Hubungan yang 'kurang harmonis'		
Blue	Context setter, strong opponent		
Red	Players, strong supporters		
Grey	Crowd, weak opponents		
Olive	Subjects, weak supporters		



Gambar 4.6. *Interest-Influence Grid* dan hubungan antar-pemangku kepentingan terkait UKDM

Keterangan:			
★ Aktor <i>Supply Side</i>	☆ Aktor <i>Demand Side</i>	 Hubungan yang baik	- - - - Hubungan yang 'kurang harmonis'
 <i>Context setter, strong opponent</i>	 <i>Players, strong supporters</i>		
 <i>Crowd, weak opponents</i>	 <i>Subjects, weak supporters</i>		

Tabel 4.1. Perbandingan Konstalasi Aktor di 4 Kabupaten

MUSI BANYUASIN	KUTAI KARTANEGARA	BERAU	BULUNGAN
Akses dan lobi terhadap aktor <i>supply side</i> sangat sulit dan terbatas	Akses dan lobi terhadap aktor <i>supply side</i> cukup sulit dan terbatas	Akses dan lobi terhadap aktor <i>supply side</i> tidak terlalu sulit dan terbatas	Akses dan lobi terhadap aktor <i>supply side</i> tidak terlalu sulit dan terbatas
Ada aktor di luar <i>supply side</i> yang cukup memiliki pengaruh (daya tawar tinggi) → sebagai <i>players</i> dan berasal dari OMS	Ada aktor di luar <i>supply side</i> yang cukup memiliki pengaruh (daya tawar tinggi) → sebagai <i>context setter</i> dan <i>players</i> , berasal dari OMS	Tidak ada aktor di luar <i>supply side</i> yang memiliki pengaruh (daya tawar rendah) → hampir seluruh aktor <i>demand side</i> menjadi <i>subject</i>	Tidak ada aktor di luar <i>supply side</i> yang memiliki pengaruh (daya tawar rendah) → hampir seluruh aktor <i>demand side</i> menjadi <i>subject</i>
Koalisi terkait UKDM bisa dilakukan antara aktor <i>demand side</i> , baik yang berperan sebagai <i>players</i> ataupun <i>subject</i> , dengan menempatkan <i>players</i> sebagai tokoh kunci untuk melobi aktor utama dalam <i>supply side</i>	Koalisi terkait UKDM bisa dilakukan antar aktor <i>demand side</i> yang berperan sebagai <i>subject</i> dan <i>weak supporters</i> dengan melakukan lobi terhadap aktor dari <i>demand side</i> yang berada dalam zona <i>context setter</i>	Koalisi terkait UKDM bisa dilakukan antar aktor dari pihak <i>demand side</i> yang berperan sebagai <i>players</i> (PARPOL pemenang pemilu) dan <i>subject</i> dengan langsung melakukan lobi terhadap aktor utama <i>supply side</i>	Koalisi terkait UKDM bisa dilakukan antar aktor dari pihak <i>demand side</i> yang berperan sebagai <i>players</i> (PARPOL pemenang pemilu) dan <i>subject</i> dengan langsung melakukan lobi terhadap aktor utama <i>supply side</i>

Akronim

BSM	: <i>Benefit Sharing Mechanism</i>
DBH	: Dana Bagi Hasil
DR	: Dana Reboisasi
KDM	: Kebijakan Distribusi Manfaat
KMA	: Kelompok Masyarakat Adat
KMS	: Kelompok Masyarakat Sipil (terdiri dari OMS dan MA)
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
PARPOL	: Partai Politik
PEMDA	: Pemerintah Daerah
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PSDH	: Provisi Sumber Daya Hutan
UKDM	: Usulan Kebijakan Distribusi Manfaat